

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menganalisis perbandingan *Financing to Deposit Ratio (LDR)*, *capital adequacy ratio (CAR)*, *ukuran bank*, dewan direksi dan dewan pengawas syariah pada Bank Umum Syariah (BUS). Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS). Periode yang diambil yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Berikut profil emiten yang menjadi sampel penelitian:

1. PT Bank BCA Syariah

Perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi, .PT.Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke

BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance.

Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.

2. PT Bank BNI Syariah

PT Bank BNI SYARIAH MULAI BEROPERASI pada tanggal 29 April 2000 sebagai unit usaha syariah dan menjadi bank umum syariah pada tanggal 19 Juni 2010. Kantor pusat PT Bank BNI Syariah terletak di Gedung Tempo Pavilion 1 Jl. HR Rasunas Said Kav 10-11, Lt 3-8, Jakarta 12950, Indonesia. Kepemilikan Saham pada PT Bank BNI Syariah yaitu PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk 99,94% dan PT Bni Life Insurance 0,6%. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

3. PT Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan

mengeluarkan produkproduk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

4. PT Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRIsyariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRIsyariah Tbk merubah kegiatan usaha yang

semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Dua tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk. Aktivitas PT Bank BRI Syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah Tbk.

Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

5. PT Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah paska krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negative yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh Bank-Bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian Bank-Bank di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan Perbank Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang member peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dan bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan system dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sutjipto, SH, No.23 tanggal 8 september 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 Nopember 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealism usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya.

6. PT Bank Bukopin Syariah

PT BANK SYARIAH BUKOPIN (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo

Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004 -2009. Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin.

7. PT Bank Victoria Syariah

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertama kalinya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Selanjutnya, PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2009.

Terakhir, Anggaran Dasar PT Bank Victoria Syariah diubah dengan Akta Nomor 45 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, SH, MKn sebagai pengganti dari Notaris Erni Rohaini, SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut ditujukan untuk merubah pasal 10 ayat 3. Perubahan tersebut telah diterima dan di catat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.10-16130 tanggal 29 Juni 2010.

Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. Adapun kepemilikan saham Bank Victoria pada Bank Victoria Syariah adalah sebesar 99.99%

Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Victoria International Tbk telah membantu tumbuh kembang Bank Victoria Syariah yang selalu terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah.

8. PT Bank MayBank Syariah Indonesia

Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h Bank Internasional Indonesia Tbk / Bank BII) (BNII) didirikan 15 Mei 1959. Kantor pusat Bank Maybank beralamat di Sentral Senayan III, Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno – Senayan, Jakarta 10270 – Indonesia. Bank Maybank memiliki 1 kantor pusat, 81 kantor cabang, 313 kantor cabang pembantu, 1 kantor cabang pembantu mikro, 23 kantor fungsional mikro, 1 kantor kas, 7 kantor cabang Syariah dan 2 kantor cabang pembantu Syariah. Pada

tanggal 31 Maret 1980 Bank Maybank melakukan penggabungan usaha (merger) dengan PT Bank Tabungan Untuk Umum 1859, Surabaya.

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Maybank Indonesia Tbk, yaitu: Sorak Financial Holdings Pte. Ltd (45,02%), Maybank Offshore Corporate Service (33,96%) dan UBS AG London (18,31%).

Pemegang pengendali utama Bank Maybank Indonesia adalah Malayan Banking Berhad (Maybank). Maybank mengendalikan Bank Maybank Indonesia melalui Sorak Financial Holdings Pte. Ltd dan Maybank Offshore Corporate Service (Labuan) Sdn. Bhd.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BNII adalah melakukan usaha di bidang perbankan, dan melakukan kegiatan perbankan lainnya berdasarkan prinsip Syariah. Bank Maybank mulai melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah sejak bulan Mei 2003.

Bank Maybank memiliki anak usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia, yakni Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF). Pada tanggal 02 Oktober 1989, BNII memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham BNII (IPO) kepada masyarakat sebanyak 12.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp11.000,- per saham.

4.2 Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *capital adequacy ratio (CAR)* dan *ukuran bank terhadap Return On*

Deposit (ROD) pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2014 sampai dengan 2018. Perhitungan dilakukan menggunakan *microsoft excel* untuk mencari *financing to deposit ratio (FDR)*, *capital adequacy ratio (CAR)*, *ukuran bank*, dewan direksi dan dewan pengawas syariah pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2014 sampai dengan 2018. Untuk menemukan *return on deposit*, sebelumnya perlu diketahui *FDR*, *CAR*, *ukuran bank*, dewan direksi dan dewan pengawas syariah. Masing-masing data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

4.2.1 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan FDR Bank Umum Syariah periode 2014-2018

Perusahaan	FDR				
	2014	2015	2016	2017	2018
BCA Syariah	49,321	46,440	46,915	49,816	52,248
BNI Syariah	16,750	19,203	19,340	21,781	29,758
Muamalat	43,480	47,560	49,002	43,028	41,705
BRI Syariah	37,474	39,233	38,637	31,698	37,546
Bank Syariah Mandiri	17,280	21,109	26,445	30,918	31,610
Bukopin Syariah	65,719	58,299	51,302	52,969	60,421
Victoria Syariah	50,016	64,086	77,490	61,479	62,590
MayBank Syariah	28,547	17,814	18,288	14,012	-
Jumlah	308,587	313,743	327,420	305,702	315,878
Rata-Rata	38,573	39,218	40,927	38,213	45,125

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa rata-rata FDR tertinggi yaitu pada tahun 2018 yaitu sebesar 45,125 artinya kemampuan bank dalam membiayai kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuditas bagi bank paling tinggi adalah sebesar 45,125% dan terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 38,213 artinya kemampuan bank dalam membiayai kembali

penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas bagi bank paling rendah adalah sebesar 32,533%. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Bank II-8 Indonesia No.17/11/PBI/2015, besarnya tingkat *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yang dapat ditoleransi adalah batas bawah FDR 78% dan batas atas FDR 92%. Jika angka rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* suatu bank berada pada angka di bawah 78% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang dihimpun. Artinya, FDR pada bank umum syariah periode tahun 2014-2018 mampu menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik.

4.2.2. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan CAR Bank Umum Syariah (BUS)
periode 2014-2018

Perusahaan	CAR				
	2014	2015	2016	2017	2018
BCA Syariah	48,797	20,079	35,859	28,315	23,760
BNI Syariah	17,928	15,218	19,161	20,102	19,103
Muamalat	9,504	9,415	8,831	12,327	11,376
BRI Syariah	12,505	13,915	14,934	14,623	25,224
Bank Syariah Mandiri	12,232	11,660	12,899	14,821	16,260
Bukopin Syariah	13,129	14,953	14,087	17,871	18,066
Victoria Syariah	20,665	17,886	19,065	24,286	25,543
MayBank Syariah	52,974	43,274	63,847	75,433	163,408
Jumlah	187,734	146,400	188,683	207,778	302,740
Rata-Rata	41,719	32,533	41,930	46,173	67,275

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa rata-rata CAR tertinggi yaitu pada tahun 2018 yaitu sebesar 67,275 artinya kemampuan bank untuk menutupi penurunan dalam aset sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aset berisiko bagi bank paling tinggi adalah sebesar 67,275% dan terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 32,533 artinya kemampuan bank untuk menutupi penurunan dalam aset sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aset berisiko bagi bank paling rendah adalah sebesar 32,533%. Semakin besar nilai CAR menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena kerugian bank yang disebabkan oleh aset berisiko dapat ditutupi oleh modal. Maka dapat dikatakan bahwa kinerja bank umum syariah paling baik terjadi pada tahun 2018 dan kinerja bank umum syariah kurang baik di tahun 2015 dikarenakan CAR yang di hasilkan paling rendah.

4.2.3. Ukuran Bank

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Ukuran Bank Bank Umum Syariah (BUS) periode 2014-2018

Perusahaan	SIZE				
	2014	2015	2016	2017	2018
BCA Syariah	28,728	29,101	29,240	29,416	29,586
BNI Syariah	30,601	30,767	30,974	31,181	31,346
Muamalat	31,765	31,677	31,653	31,753	31,678
BRI Syariah	30,644	30,819	30,952	31,082	31,266
Bank Syariah Mandiri	31,757	31,805	31,998	32,108	32,219
Bukopin Syariah	29,272	29,394	29,563	29,600	29,476
Victoria Syariah	27,995	27,953	28,117	28,326	28,385
MayBank Syariah	28,527	28,187	27,927	27,874	27,218
Jumlah	239,289	239,702	240,423	241,341	241,175
Rata-Rata	29,911	29,963	30,053	30,168	30,147

Berdasarkan tabel 4.3 hasil perhitungan *Ukuran Bank (SIZE)* pada Bank Umum Syariah diatas dengan jendela penelitian menggunakan periode tahun 2014-2018 mengalami fluktuatif. Nilai *Ukuran Bank (SIZE)* pada Bank Umum Syariah yang terkecil mengalami penurunan yaitu pada MayBank Syariah. Nilai *Ukuran Bank (SIZE)* pada Bank Umum Syariah yang terbesar yaitu pada Bank Syariah Mandiri. Jika dilihat dari keseluruhan nilai *Ukuran Bank (SIZE)* pada tahun 2014-2017 mengalami kenaikan yaitu 29,911 , 29,963, 30,053 dan 30,168. Nilai *Ukuran Bank (SIZE)* Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan yaitu 30,168 menjadi 30,147. Bank umum syariah periode tahun 2014-2018 merupakan perusahaan yang besar dikarenakan jumlah total aset pada bank umum syariah lebih dari Rp 100.000.000.000,00.

4.2.4 Dewan Direksi

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Dewan Direksi Bank Umum Syariah (BUS) periode 2014-2018

Perusahaan	Dewan Direksi				
	2014	2015	2016	2017	2018
BCA	3	3	3	3	4
BNI	4	4	4	4	5
Muamalat	5	5	6	7	6
BRI	5	5	5	5	5
BSM	7	7	6	7	6
Bukopin	4	4	4	4	4
Victoria	4	4	4	4	4
MaYBank	3	3	3	4	4
Jumlah	35	35	35	38	38
Rata-Rata	4	4	4	5	5

Berdasarkan tabel 4.4 hasil perhitungan dewan direksi pada Bank Umum Syariah diatas dengan jendela penelitian menggunakan periode tahun 2014-2018 rata-rata dewan direksi pada Bank Umum Syariah sebanyak 4 orang. Bank Syariah Mandiri memiliki dewan direksi terbanyak di bandingkan dengan bank syariah yang lainnya sebesar 6 dan 7 orang. Bank Syariah dikatakan besar jika bank tersebut memiliki jumlah dewan direksi lebih dari 3 orang, jika bank syariah memiliki dewan direksi 3 orang atau kurang dari 3 orang maka bank tersebut dikatakan kecil (otoritas jasa keuangan, 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi bank umum syariah jika dilihat dari rata-rata dapat dikatakan bank syariah yang besar.

4.2.5 Dewan Pengawas Syariah

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Dewan Pengawas Syariah Bank Umum Syariah (BUS) periode 2014-2018

Perusahaan	Dewan Pengawas Syariah				
	2014	2015	2016	2017	2018
BCA	2	2	2	2	2
BNI	2	2	2	2	2
Muamalat	3	3	3	3	3
BRI	2	2	2	2	2
BSM	3	3	3	3	3
Bukopin	2	2	2	2	2
Victoria	2	2	2	2	2
MaYBank	2	2	2	2	2
JUMLAH	18	18	18	18	18
RATA-RATA	2	2	2	2	2

Berdasarkan tabel 4.5 hasil perhitungan dewan pengawas syariah pada Bank Umum Syariah diatas dengan jendela penelitian menggunakan periode tahun 2014-2018, rata-rata Bank Umum syariah memiliki dewah

pengawas syariah sebanyak 2 orang. Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri yang memiliki dewan syariah terbanyak yaitu 3 orang. Ketentuan mengenai jumlah anggota DPS juga diatur dalam PBI No. 11/3/PBI/2009 yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPS paling sedikit adalah 2 (dua) orang atau 1 (satu) dan paling banyak 50% dari jumlah anggota dewan direksi. Dewan pengawas syariah pada bank umum syariah periode tahun 2014-2018 memiliki jumlah dewan pengawas syariah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.

4.2.6 Return On Deposit

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Return On Deposit (ROD) Bank Umum Syariah (BUS)

Perusahaan	ROD				
	2014	2015	2016	2017	2018
BCA Syariah	52,367	21,899	32,659	29,027	27,835
BNI Syariah	20,354	20,700	19,161	26,168	26,669
Muamalat	11,954	11,472	9,940	17,449	13,583
BRI Syariah	13,550	15,839	15,957	14,123	26,399
Bank Syariah Mandiri	14,455	17,941	18,125	19,413	18,621
Bukopin Syariah	15,416	16,621	15,670	20,059	24,411
Victoria Syariah	16,932	15,535	16,774	20,626	19,432
MayBank Syariah	122,15 5	111,81 5	155,99 7	223,93 3	-
Jumlah	267,18 3	231,82 2	284,28 3	370,79 9	156,95 1
Rata-Rata	33,398	28,978	35,535	46,350	22,422

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa rata-rata ROD tertinggi yaitu pada tahun 2017 yaitu sebesar 46,350 artinya kemampuan bank dalam mengembalikan deposito agar menghasilkan keuntungan bagi

perusahaan paling tinggi adalah sebesar 46,350% dan terendah pada tahun 2018 yaitu sebesar 22,422% artinya kemampuan bank dalam mengembalikan deposito agar menghasilkan keuntungan bagi perusahaan paling rendah adalah sebesar 22,422%. Semakin besar nilai ROD menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi deposito semakin besar. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari investasi deposito yang diberikan pada perusahaan (Wild, Subramanyam, dan Halsey, 2005). Maka dapat dikatakan bahwa kinerja bank umum syariah paling baik terjadi pada tahun 2017 dan kinerja bank umum syariah kurang baik di tahun 2018 dikarenakan ROD yang dihasilkan paling rendah.

4.3 Hasil Uji Persyaratan Analisis

4.3.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk menilai karakteristik data *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *capital adequacy ratio (CAR)*, ukuran bank, dewan direksi dan dewan pengawas syariah terhadap ROD pada Bank Umum Syariah (BUS). Untuk mengetahuinya yaitu dengan menghitung nilai minimal, nilai maksimal, rata-rata (mean) dan standar deviasi. Berikut merupakan hasil dari uji statistik deskriptif :

Tabel 4.7 Hasil Statistik Deskriptif

	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Cos_ROD	-1,00	1,00	-0,0277	0,6886

FDR	,00	77,49	39,2832	17,41766
Sin_CAR	-1,00	1,00	0,2148	0,72755
SIZE	27,22	32,22	30,0483	1,50426
BOARD	3,00	7,00	4,5250	1,19802
DPS	2,00	3,00	2,2500	0,43583

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari jumlah 40 sample perusahaan perusahaan selama periode pengamatan 2014-2018 dapat disimpulkan bahwa pada tabel 4.7 menunjukkan pada variabel ROD memiliki nilai maksimum sebesar -1,00, nilai minimum 1,00, Nilai rata-rata ROD sebesar -0,0277 sedangkan standar deviasi sebesar 0,6886, nilai rata-rata ROD sebesar -0,0277 artinya kemampuan rata-rata perusahaan dalam mengelola mengembalikan deposito agar menghasilkan keuntungan bagi perusahaan adalah sebesar -0,0277 dengan penyimpangan sebesar 0,6886. Standar deviasi di gunakan untuk membandingkan penyebaran atau penyimpangan dua kelompok atau lebih, standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa nilai sample berkelompok dengan nilai rata-rata hitung, sedangkan nilai standar deviasi yang besar menunjukan adanya perbedaan nilai yang jauh di antara anggota sample dan populasi (Suharyadi, 2015). Dengan demikian standar deviasi merupakan cerminan dari rata-rata penyimpangan data.

Pada variabel *Financing to Deposit Ratio (FDR)* memiliki nilai maksimum 77,49 dan nilai minimum 0,000 artinya risiko *Financing to Deposit Ratio (FDR)* paling tinggi yaitu sebesar 77,49 dan risiko *Financing to Deposit Ratio (FDR)* paling rendah yaitu sebesar 0,000. Nilai rata-rata risiko *Financing to Deposit Ratio (FDR)* sebesar 39,2832 dan standar deviasi 17,4176, artinya pembiayaan bermasalah yang di

hasilkan oleh deposito adalah sebesar 39,2832 dengan penyimpangan sebesar 17,4176.

Pada variabel *Capital Adequacy Ratio (CAR)* menggunakan sin memiliki nilai maksimum 1,00 dan nilai minimum -1,00 artinya kecukupan modal dalam mengelola aktiva tertimbang menurut risiko paling tinggi yaitu sebesar 1,00 dan CAR paling rendah yaitu sebesar -1,00. Nilai rata-rata CAR sebesar 0,2148 dan standar deviasi 0,72755, artinya kecukupan modal dalam mengelola aktiva tertimbang menurut risiko yang di hasilkan adalah sebesar 0,2148 dengan penyimpangan sebesar 0,72755. Risiko yang tinggi dapat menimbulkan kerugian pada bank dan menurunkan laba yang dihasilkan, begitupun sebaliknya risiko yang rendah dapat memberikan keuntungan bagi bank.

Pada variabel ukuran bank memiliki nilai maksimum 32,22 dan nilai minimum 27,22 artinya ukuran bank paling tinggi yaitu sebesar 32,22 dan ukuran bank paling rendah yaitu sebesar 27,22. Nilai rata-rata ukuran bank sebesar 30,0483 dan standar deviasi 1,50426, artinya nilai rata-rata ukuran bank yang dihasilkan adalah sebesar 30,0483 dengan penyimpangan sebesar 1,50426. Ukuran bank yang tinggi dapat menimbulkan kinerja yang baik pula bagi bank.

Pada variabel dewan direksi memiliki nilai maksimum 7,00 dan nilai minimum 3,00 artinya dewan direksi yang di hasilkan oleh Bank Umum Syariah paling tinggi yaitu sebesar 7 dan dewan direksi yang di hasilkan oleh Bank Umum Syariah paling rendah yaitu sebesar 3,00. Nilai rata-rata dewan direksi sebesar 4,5250 dan standar deviasi 1,19802, artinya dewan direksi yang di hasilkan adalah sebesar 4,5250 dengan penyimpangan sebesar 1,19802.

Pada variabel dewan pengawas syariah memiliki nilai maksimum 3,00 dan nilai minimum 2,00 artinya dewan pengawas syariah yang di hasilkan oleh Bank Umum Syariah paling banyak yaitu sebesar 3,00 dan

dewan pengawas syariah yang di hasilkan oleh Bank Umum Syariah paling sedikit yaitu sebesar 2,00. Nilai rata-rata dewan pengawas syariah sebesar 2,2500 dan standar deviasi 0,43583, artinya dewan pengawas syariah yang di hasilkan adalah sebesar 2,2500 dengan penyimpangan sebesar 0,43583.

4.4 Hasil Uji Persyaratan Data

4.4.1 Uji Normalitas

Menurut Imam Ghozali (2011), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi. Uji statistik untuk melihat normalitas data dalam penelitian ini menggunakan pengujian *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas

<i>Asymp.Sig. (2-tailed)</i>	Kesimpulan
0,200	Berdistribusi normal

Dari hasil output di atas didapat nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang dihasilkan dari model regresi adalah $0,200 > \alpha 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independe). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi. maka variabel-

variabel ini tidak ortogonal variabel. Hasil matriks korelasi antara variabel bebas dan perhitungan nilai tolerance serta *Variance Inflation faktor* (VIF) untuk model regresi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas

	VIF	Kesimpulan
FDR	1,082	tidak ada multikolinieritas
CAR	1,429	tidak ada multikolinieritas
SIZE	3,162	tidak ada multikolinieritas
BOARD	5,331	tidak ada multikolinieritas
INT	3,600	tidak ada multikolinieritas

Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10, Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,

2011). Adapaun uji ini menggunakan model uji *Glejser* dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Kesimpulan
FDR	0,838	tidak ada heteroskedastisitas
CAR	0,770	tidak ada heteroskedastisitas
SIZE	0,245	tidak ada heteroskedastisitas
BOARD	0,396	tidak ada heteroskedastisitas
DPS	0,950	tidak ada heteroskedastisitas

Dalam pengujian heteroskedastisitas menunjukkan dengan jelas bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat nilai Absolut (AbsRes). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas 5%, jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

4.4.4 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan pengujian *Run-test*. Berikut hasil pengujian *Run-test* :

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Runs-Test

<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Kesimpulan
0,423	Tidak terjadi Autokorelasi

Dari hasil output di atas didapat nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang dihasilkan dari model regresi adalah $0,423 > \alpha 0,05$.

4.5 Metode Analisis Data

4.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Imam Gozali (2013) Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan, antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif.

Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

	B	Std.Error	t hitung	Sig
Constanta	-4,625	3,050	-1,516	0,139
FDR	-0,010	0,006	-1,815	0,048

CAR	0,354	0,158	2,237	0,032
SIZE	0,137	0,114	1,200	0,238
BOARD	-0,260	0,186	-1,401	0,170
DPS	0,887	0,417	-2,127	0,041
R ²	0,333			

Berikut adalah hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini:

$$Y = -4,625 - 0,010Fdr + 0,354Car + 0,137Size - 0,260Board + 0,887Dps$$

Dengan demikian dapat diartikan bahwa :

1. Konstanta *Return On Deposit (ROD)* sebesar -4,625 yang artinya apabila *Financing to Deposit Ratio (FDR) (X1)*, *capital adequacy ratio (CAR) (X2)*, ukuran bank (X3), dewan direksi (X4) dan dewan pengawas syariah (X5) bernilai 0 maka nilai *Return On Deposit (Y)* sebesar -4,625 dengan catatan variabel lain dianggap tetap.
2. Nilai koefisien variabel *Financing to Deposit Ratio (FDR)* sebesar -0,010 yang artinya apabila *Financing to Deposit Ratio (FDR)* turun sebesar 1 satuan maka nilai *Return On Deposit (Y)* naik sebesar 0,010 dengan catatan variabel lain dianggap tetap.
3. Nilai koefisien variabel *capital adequacy ratio (CAR)* sebesar 0,354 yang artinya apabila *capital adequacy ratio (CAR)* naik sebesar 1 satuan maka nilai *Return On Deposit (Y)* naik sebesar 0,354 dengan catatan variabel lain dianggap tetap.
4. Nilai koefisien variabel ukuran bank sebesar 0,137 yang artinya apabila ukuran bank naik sebesar 1 satuan maka nilai *Return On*

Deposit (Y) naik sebesar 0,137 dengan catatan variabel lain dianggap tetap.

5. Nilai koefisien variabel dewan direksi sebesar -0,260 yang artinya apabila dewan direksi turun sebesar 1 satuan maka nilai *Return On Deposit (Y)* naik sebesar 0,260 dengan catatan variabel lain dianggap tetap.
6. Nilai koefisien variabel dewan pengawas syariah sebesar 0,887 yang artinya apabila dewan pengawas syariah naik sebesar 1 satuan maka nilai *Return On Deposit (Y)* naik sebesar 0,887 dengan catatan variabel lain dianggap tetap.

4.5.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen (Ghozali, 2011).

Berdasarkan tabel 4.12 Koefisien Determinasi pada Bank Umum Syariah (BUS) diatas dapat diketahui bahwa Nilai Adjusted R-Square sebesar 0,333 menunjukkan bahwa kemampuan variabel *Financing to Deposit Ratio (FDR)* , *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, ukuran bank, dewan direksi dan dewan pengawas syariah dalam menjelaskan variabel *Return On Deposit (ROD)* Bank Umum Syariah sebesar 33,3%. Artinya,

Financing to Deposit Ratio (FDR) , *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, ukuran bank, dewan direksi dan suku bunga dapat menjelaskan variabel *Return On Deposit* pada Bank Umum Syariah hanya sebesar 33,3% sedangkan sisanya 66,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada didalam model regresi.

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji statistik t dimaksudkan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Kriteria pengujian hipotesis untuk uji statistik t adalah sebagai berikut:

1. Bila $t_{sig} < 0,05$ maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Bila $t_{sig} > 0,05$ maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa :

1. Nilai variabel *Financing to Deposit Ratio (FDR)* (X_1) sebesar 0,048 berarti bahwa nilai tersebut $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh signifikan negatif terhadap *Return On Deposit (ROD)* dengan nilai koefisien sebesar -0,010.
2. Nilai variabel *Capital Adequacy Ratio (CAR)* (X_2) sebesar 0,032 berarti bahwa nilai tersebut $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh signifikan positif terhadap *Return On Deposit (ROD)* dengan nilai koefisien sebesar 0,354.

3. Nilai variabel Ukuran Bank (X_3) sebesar 0,238 berarti bahwa nilai tersebut $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran bank tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Deposit (ROD)*.
4. . Nilai variabel dewan direksi (X_4) sebesar 0,170 berarti bahwa nilai tersebut $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Deposit (ROD)*.
5. Nilai variabel dewan pengawas syariah (X_5) sebesar 0,041 berarti bahwa nilai tersebut $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan positif terhadap *Return On Deposit (ROD)* dengan nilai koefisien sebesar 0,887.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Return On Deposit pada Bank Umum Syariah (BUS)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio (FDR)* (X_1) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,048 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel variabel *Financing to Deposit Ratio (FDR)* (X_1) berpengaruh terhadap *Return On Deposit (ROD)* pada Bank Umum Syariah. Hal ini menunjukkan adanya *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yang tinggi dan tidak mencapai 92% dalam suatu bank syariah, maka akan dapat dipercaya oleh deposan. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yang dipandang baik juga memiliki *Return On Deposit (ROD)* yang baik.

Financing to Deposit Ratio (FDR) yang rendah menunjukkan tingkat likuiditas bank sehingga jika semakin tinggi ukuran FDR bank syariah menggambarkan keadaan yang kurang likuid dari bank syariah dengan

ukuran FDR yang lebih rendah. Sebaliknya, menurunkan ukuran FDR bank syariah, bank dapat mempertahankan alat likuiditas yang berlebihan dan akan menyebabkan tekanan pada pendapatan bank syariah dalam bentuk biaya tinggi pemeliharaan uang tunai (Gozali 2006). Oleh karena itu, peluang yang lebih besar dari bank syariah untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan mengoptimalkan distribusi pembiayaan akan meningkat ROD bank syariah. Gozali (2006) menemukan positif hubungan antara FDR dan ROD di bank syariah sehingga .

Hasil ini jika dikaitkan dengan fenomena yang ada dalam penelitian, dilihat bahwa perusahaan tidak mencerminkan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yang baik, maka *Return On Deposit (ROD)* bank syariah menurun. Artinya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio (FDR)* maka *Return On Deposit (ROD)* semakin rendah. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dapat dilihat dari jumlah pembiayaan dengan penyebut yaitu dana pihak ketiga sedangkan *Return On Deposit (ROD)* dapat dilihat dari jumlah modal dengan penyebut total investasi deposito. Deposito merupakan salah satu produk dana pihak ketiga.

Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian Hamza (2016) dan terbukti bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap *Return On Deposit (ROD)*. Dapat disimpulkan bahwa bank yang memiliki FDR yang rendah menyebabkan *Return On Deposit (ROD)* rendah.

4.7.2 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) (X_2) terhadap Return On Deposit pada Bank Umum Syariah (BUS)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio (CAR) (X_2)* memiliki nilai probabilitas sebesar $0,032 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Capital Adequacy*

Ratio (CAR) (X₂) berpengaruh signifikan positif terhadap *Return On Deposit (ROD)* pada Bank Umum Syariah. Hal ini menunjukkan adanya *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang tinggi dalam suatu bank syariah, maka akan dapat dipercaya oleh deposan. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang dipandang baik juga memiliki *Return On Deposit (ROD)* yang baik.

CAR yang meningkat akan meningkatkan risiko yang diambil oleh pemegang saham dan deposan; peningkatan risiko diharapkan menjadi trade-off untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi yang akan tercermin dalam ROD bank syariah (Hamza 2016). Menurut Aysan et al. (2013), CAR yang lebih tinggi dapat juga menjadi ruang bagi bank syariah untuk memperluas pasar mereka, dan dengan pasar yang lebih luas diharapkan kinerja bank syariah membaik.

Dilihat dari hasil penelitian *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh terhadap *Return On Deposit* pada Bank Umum Syariah, karena dengan adanya peningkatan CAR, maka ada peningkatan ROD bank syariah (Hamza 2016).

Hasil ini jika dikaitkan dengan fenomena yang ada dalam penelitian, dilihat bahwa perusahaan tidak mencerminkan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang baik, maka *Return On Deposit (ROD)* bank syariah menurun. Artinya semakin rendah *Capital Adequacy Ratio (CAR)* maka *Return On Deposit (ROD)* semakin rendah. Karena *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dilihat dari jumlah modal bank dan aktiva tertimbang menurut risiko sedangkan *Return On Deposit (ROD)* dilihat dari modal bank dan total investasi deposito.

Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamza (2016) dan Sugeng Wahyudi (2018) menemukan bahwa CAR berpengaruh signifikan positif terhadap Return On deposit bank syariah.

4.7.3 Pengaruh ukuran bank (X_3) terhadap Return On Deposit pada Bank Umum Syariah (BUS)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa variabel ukuran bank (X_3) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,238 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran bank (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Deposit (ROD)* pada Bank Umum Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ukuran bank mengalami kenaikan maka tidak ada pengaruh *Return On Deposit (ROD)* akan mengalami kenaikan.

Menurut Aysan et al. (2013), ukuran bank bisa dilihat dari total aset, dan itu adalah sinyal untuk deposan mengenai kinerja dan daya saing bank yang mendorong deposan untuk menginvestasikan dana mereka ke syariah bank yang bersangkutan. Juga, menurut Bashir (1999), syariah bank dengan aset yang lebih besar akan mendapatkan keuntungan skala ekonomi yang berdampak pada hasil yang di tawarkan.

Hasil ini jika dikaitkan dengan fenomena yang ada dalam penelitian, dilihat bahwa perusahaan tidak mencerminkan *ukuran bank* yang kecil, maka *Return On Deposit (ROD)* bank syariah akan tinggi. Artinya, jika ukuran bank tersebut kecil tidak akan mempengaruhi nilai *Return On Deposit (ROD)*. Karena ukuran bank dilihat dari total asset sedangkan *Return On Deposit (ROD)* dilihat dari jumlah modal bank dan total investasi deposito.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hamza (2016) menemukan ukuran bank tidak berpengaruh terhadap *Return On Deposit (ROD)* pada bank.

4.7.4 Pengaruh dewan direksi (X_4) terhadap Return On Deposit pada Bank Umum Syariah (BUS)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa variabel dewan direksi (X_4) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,170 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dewan direksi (X_4) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Deposit (ROD)* pada Bank Umum Syariah.

Ghaffar (2014) berpendapat bahwa untuk ukuran dewan direksi yang lebih besar diperlukan pengalaman bank syariah. Dewan direksi yang besar akan bermanfaat dalam menetapkan strategi dan pengawasan yang lebih baik untuk bersaing dengan bank konvensional. Ukuran dewan direksi akan mempengaruhi kinerja bank syariah. Ghaffar (2014) menemukan adanya hubungan positif ukuran dewan direksi terhadap ROD bank syariah.

Hal ini jika dikaitkan dengan fenomena dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *Return On Deposit* pada Bank Umum Syariah, karena pada saat dewan direksi mengalami penambahan anggota maka tidak ada pengaruh *Return On Deposit (ROD)* akan mengalami kenaikan. Ghaffar (2014) berpendapat bahwa untuk ukuran dewan direksi yang lebih besar diperlukan pengalaman bank syariah. Dewan direksi yang besar akan bermanfaat dalam menetapkan strategi dan pengawasan yang lebih baik untuk bersaing dengan bank konvensional. Ukuran dewan direksi akan mempengaruhi kinerja bank syariah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Hamza (2016) menemukan bahwa variabel dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *Return On Deposit (ROD)* pada bank.

4.7.5 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (X₅) terhadap Return On Deposit pada Bank Umum Syariah (BUS)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa variabel dewan pengawas syariah (X₅) memiliki nilai probabilitas sebesar $0,041 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dewan pengawas syariah (X₅) berpengaruh signifikan terhadap *Return On Deposit (ROD)* pada Bank Umum Syariah. Hal ini menunjukkan adanya dewan pengawas syariah yang tinggi dalam suatu bank syariah, maka akan dapat dipercaya oleh deposan. dewan pengawas syariah yang dipandang baik juga memiliki *Return On Deposit (ROD)* yang baik.

Dewan Pengawas Syariah yang kecil akan mudah dikendalikan dan dipengaruhi oleh eksekutif dan dewan direksi, sedangkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang besar dengan berbagai pengalaman dan keterampilan syariah mengarah pada interpretasi yang lebih baik terhadap produk bank syariah dan operasi (Ghaffar, 2014). Ukuran Dewan Pengawas Syariah yang besar dapat mendorong kredibilitas bank karena prioritas menyesuaikan kepatuhan dengan hukum Islam sehingga perlindungan hak deposan lebih aman dan menghindari penarikan dana deposan. Ini kemudian akan mendorong kinerja bank syariah, terutama profitabilitas.

Hasil ini jika dikaitkan dengan fenomena yang ada dalam penelitian, dilihat bahwa perusahaan tidak mencerminkan Dewan Pengawas Syariah yang besar, maka *Return On Deposit (ROD)* bank syariah menurun. Artinya semakin kecil Dewan Pengawas Syariah maka *Return On Deposit (ROD)* semakin kecil.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Ghaffar (2014) dan Mollah & Zaman (2015) menemukan bahwa variabel Dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan positif terhadap *Return On Deposit (ROD)* pada Bank Umum Syariah.